

Evaluasi Kebijakan Digitalisasi Pendidikan di SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan (Studi Komparatif Sekolah Pedesaan dan Perkotaan)

¹Nurul Aulia, ¹Mohamad Mustari, ¹Muhammad Makki

¹Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram

*Corresponding Author e-mail: nrlaulia2508@gmail.com

Received: Apryl 2025; Revised: May 2025; Published: June 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di wilayah pedesaan dan perkotaan, dengan studi kasus di SDN 10 Buwun Mas (Kabupaten Lombok Barat) dan SDN 23 Ampenan (Kota Mataram). Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda nasional seperti program Merdeka Belajar dan target RPJMN 2020–2024 yang menekankan transformasi digital dalam pendidikan. Fokus evaluasi diarahkan pada lima platform digital utama: Platform Merdeka Mengajar (PMM), ARKAS, SIPLah, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dan Rapor Pendidikan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kesenjangan nyata dalam infrastruktur dan literasi digital; menurut Kemendikbudristek (2023), sekitar 42% sekolah dasar di daerah 3T masih belum memiliki akses internet stabil, dibandingkan hanya 7% di perkotaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif dan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa SDN 23 Ampenan telah mengimplementasikan kebijakan digitalisasi dengan baik karena dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai. Sementara itu, SDN 10 Buwun Mas menghadapi berbagai tantangan mulai dari minimnya perangkat digital hingga rendahnya literasi teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan digitalisasi pendidikan masih belum merata dan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan kesiapan lokal. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, menyediakan pelatihan intensif, serta melakukan supervisi berkelanjutan agar sekolah di daerah tertinggal mampu bertransformasi secara digital secara efektif..

Kata kunci: Kebijakan Digitalisasi Pendidikan, Studi Komparatif, Sekolah Pedesaan, Sekolah Perkotaan

Evaluation of the Digitalization Policy of Education at SDN 10 Buwun Mas and SDN 23 Ampenan (comparative study of rural and urban schools)

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the digitalization policy for elementary education in rural and urban areas, with a case study at SDN 10 Buwun Mas (West Lombok Regency) and SDN 23 Ampenan (Mataram City). This policy is part of the national agenda such as the Merdeka Belajar program and the 2020–2024 RPJMN targets that emphasize digital transformation in education. The focus of the evaluation is directed at five main digital platforms: the Merdeka Mengajar Platform (PMM), ARKAS, SIPLah, Computer-Based National Assessment (ANBK), and Education Report. The background of this study is based on the real gap in digital infrastructure and literacy; according to the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (2023), around 42% of elementary schools in 3T areas still do not have stable internet access, compared to only 7% in urban areas. Using a qualitative approach with a comparative study method and the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model, data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed thematically. The results show that SDN 23 Ampenan has implemented the digitalization policy well because of adequate infrastructure and human resource support. Meanwhile, SDN 10 Buwun Mas faces various challenges ranging from the lack of digital devices to low technological literacy. This study concludes that the implementation of the education digitalization policy is still uneven and is greatly influenced by the geographical context and local readiness. Recommendations are addressed to the central and regional governments to accelerate the distribution of digital infrastructure, provide intensive training, and carry out ongoing supervision so that schools in disadvantaged areas are able to transform digitally effectively.

Keywords: Educational Digitalization Policy, Comparative Study, Rural Schools, Urban Schools

How to Cite: Aulia, N., Mustari, M., Makki, M., (2025). Evaluasi Kebijakan Digitalisasi Pendidikan di SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan (Studi Komparatif Sekolah Pedesaan Dan Perkotaan *Journal of Authentic Research*, 4(1), 363–377. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.3038>



<https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.3038>

Copyright© 2025, Aulia et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dunia pendidikan menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk merespons tantangan abad ke-21 dan mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurut UNESCO (2020), digitalisasi pendidikan merupakan bagian penting dari upaya global dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Di Indonesia, kebijakan ini dipercepat melalui program Merdeka Belajar yang mengintegrasikan teknologi dengan sistem pembelajaran nasional, termasuk di dalamnya platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), ARKAS, SIPLah, ANBK, dan Rapor Pendidikan. Mustari (2024) menyatakan bahwa digitalisasi juga merupakan bagian dari upaya menghadapi era masyarakat 5.0 yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi dan informasi dalam seluruh aspek kehidupan. Pendidikan dituntut tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang melek digital. Namun, implementasi kebijakan ini tidak berjalan mulus di semua daerah. Tantangan signifikan terutama dihadapi oleh sekolah-sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur seperti akses internet, listrik, serta perangkat digital.

Data Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa sekitar 19% sekolah di Indonesia belum memiliki akses internet dan 4% belum teraliri listrik. Ketimpangan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program digitalisasi yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, data Rapor Pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di SD di Lombok Barat mengalami penurunan, sedangkan Kota Mataram justru mengalami peningkatan literasi dan numerasi siswa secara signifikan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemendikbudristek melalui Rapor Pendidikan memang melaporkan peningkatan capaian kompetensi (literasi dan numerasi), dari 59,5% (2022) → 68,1% (2023) → 70,0% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa program digitalisasi di sekolah juga ikut andil dalam peningkatan literasi dan numerasi tersebut. Namun dalam hal ini peneliti mengkaji belum adanya kesetaraan dalam distribusi perangkat maupun fasilitas penunjang di seluruh sekolah di Indonesia. Sekolah-sekolah di perkotaan, seperti SDN 1 Gerung Utara dan SDN 23 Ampenan, memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Mereka mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, memiliki akses internet stabil, serta tenaga pendidik yang terbiasa menggunakan teknologi. Di sisi lain, sekolah seperti SDN 10 Buwun Mas di wilayah pedesaan masih terkendala perangkat digital, jaringan internet, dan kemampuan guru dalam mengaplikasikan teknologi pembelajaran. Observasi awal menunjukkan bahwa SDN 1 Gerung Utara mampu mengintegrasikan teknologi dalam sistem pembelajaran secara menyeluruh, bahkan mengembangkan administrasi berbasis digital. Sementara di SDN 10 Buwun Mas, platform seperti PMM hanya digunakan secara terbatas, bahkan hanya saat guru turun ke kota. Di sekolah ini, kebijakan digitalisasi lebih dipandang sebagai kewajiban administratif daripada sebagai upaya transformasi pembelajaran yang substansial. Sebaliknya, kebutuhan dasar siswa seperti sepatu, alat tulis, dan bahan ajar justru lebih mendesak. Kesenjangan ini juga diperparah oleh faktor sosial ekonomi. Banyak keluarga di pedesaan yang belum memiliki perangkat digital seperti komputer atau smartphone, berbeda dengan keluarga di perkotaan yang memiliki akses penuh terhadap perangkat dan jaringan internet.

Kondisi Indonesia mencerminkan pola ketimpangan digital yang juga terjadi di negara berkembang lain seperti Filipina dan India. Di Filipina, misalnya, digitalisasi pendidikan terkendala oleh kesenjangan infrastruktur dan keterampilan guru, namun pemerintah mereka berfokus pada penyediaan platform lokal berbasis offline. Sementara di India, proyek *Digital India* menunjukkan bagaimana intervensi kontekstual dapat mengurangi kesenjangan akses melalui pelatihan intensif dan pengadaan perangkat di daerah pedesaan. Perbandingan ini memperkuat pentingnya mengkaji konteks Indonesia yang unik, terutama dalam relasi antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Teori *Digital Divide* menurut Van Dijk (2006) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses fisik ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga melibatkan perbedaan dalam kemampuan menggunakan dan memanfaatkan TIK secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena Covid-19 mendorong penggunaan perangkat digital yang lebih luas. Namun pandemi ini juga memperjelas kesenjangan di mana siswa dari daerah terpencil sangat kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Kesenjangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan teori *Policy Implementation* dari Pressman dan Wildavsky (1973), yang menyoroti bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman terhadap konteks lokal. Menurut SMERU (2019), 50% masyarakat perkotaan sudah terbiasa dengan internet, sementara di pedesaan hanya sekitar 30%. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan. Penelitian Sudarmanto (2020) menyebutkan bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh perbedaan pengeluaran pemerintah daerah dan kemampuan rumah tangga dalam membiayai pendidikan. Hidayat dalam Yuniarti (2021) menambahkan bahwa rendahnya kualitas guru, sarana sekolah, mahal biaya pendidikan, dan standarisasi nasional-internasional juga memperbesar ketimpangan.

Kesenjangan ini, jika tidak ditangani secara serius, berpotensi membuat kebijakan digitalisasi justru memperlebar jurang akses dan mutu pendidikan antara desa dan kota. Di tingkat kebijakan, daerah perkotaan cenderung fokus pada pengembangan teknologi canggih seperti pembelajaran berbasis AI, laboratorium digital, dan pembelajaran hybrid. Sementara itu, di wilayah pedesaan, kebijakan lebih diarahkan pada penyediaan akses dasar, pelatihan literasi digital, serta solusi seperti modul offline dan layanan satelit. Beberapa sekolah pedesaan bahkan lebih membutuhkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan primer siswa daripada teknologi canggih yang belum bisa dimanfaatkan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di dua wilayah dengan karakteristik berbeda, yaitu SDN 10 Buwun Mas (pedesaan) dan SDN 23 Ampenan (perkotaan), khususnya dalam pelaksanaan program PMM, ARKAS, SIPLah, ANBK, dan Rapor Pendidikan. Dari penelitian yang dilakukan Dewi (2021) memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan digitalisasi yang diterapkan di daerah yang berbeda dengan lingkup yang lebih luas lagi. Dengan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan digitalisasi serta merumuskan rekomendasi yang dapat membantu mewujudkan pemerataan akses pendidikan berbasis digital. Hasilnya diharapkan dapat menjadi

landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di dua sekolah dasar dengan karakteristik geografis berbeda, yakni SDN 10 Buwun Mas (pedesaan) dan SDN 23 Ampenan (perkotaan). Pada aspek konteks, pemilihan sekolah didasarkan pada lokasi geografis, tingkat akreditasi, dan keterlibatan dalam program digitalisasi nasional seperti PMM, ARKAS, SIPLah, ANBK, dan Rapor Pendidikan. Aspek input mencakup kondisi geografis, inventarisasi perangkat TIK seperti proyektor, laptop, dan perangkat, serta kompetensi dan pelatihan guru. Proses dievaluasi melalui perbandingan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan platform digital dan pelaksanaan program digitalisasi di masing-masing sekolah, seperti penggunaan PMM dalam pembelajaran dan pelaksanaan ANBK. Sementara itu, aspek produk dinilai berdasarkan indikator seperti peningkatan nilai ANBK, adopsi platform digital oleh guru, dan perubahan praktik pembelajaran berbasis teknologi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian divalidasi melalui triangulasi metode dan sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi kelas, dan dokumen kebijakan. Contoh pertanyaan kunci dalam wawancara mencakup: “Bagaimana tantangan penerapan digitalisasi di sekolah Anda?” dan “Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan literasi digital?” Pendekatan ini dipilih karena fleksibilitas metode kualitatif yang memungkinkan penyesuaian dengan dinamika lapangan dan konteks lokal.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah di SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan yang merupakan representasi dari sekolah pedesaan dan perkotaan. Subjek ini dipilih karena merupakan tokoh langsung yang bersentuhan dan melaksanakan kebijakan digitalisasi di sekolah. penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan digitalisasi berdasarkan kebutuhan dan peluang, sumber daya, pelaksanaan atau proses, dan hasil akhir yang ada di sekolah pedesaan dan perkotaan.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara semi-terstruktur akan disusun untuk menggali informasi kualitatif dari guru dan kepala sekolah. Lembar observasi akan digunakan untuk mencatat informasi selama kunjungan ke kelas. Dokumen-dokumen kebijakan pendidikan yang relevan akan dikumpulkan untuk dianalisis. Dokumen yang akan dikaji mencakup kebijakan digitalisasi pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan setempat, statistik pendidikan, dan literatur terkait yang relevan.

Tabel 1. Instrumen dan sumber data

Tahap CIPP	Instrumen	Sumber Data
Context	Panduan wawancara terkait kebijakan digitalisasi, kebutuhan sekolah, dan hambatan lokal	Kepala sekolah, guru, dokumen profil sekolah
Input	Daftar inventaris perangkat TIK, pedoman observasi sarana, panduan wawancara pelatihan guru	Guru, operator sekolah, observasi fasilitas
Process	Panduan observasi implementasi PMM, SOP penggunaan ARKAS/SIPLah/ANBK, pedoman wawancara proses pelaksanaan	Guru, kepala sekolah, dokumen SOP sekolah
Output	Panduan wawancara tentang dampak digitalisasi, lembar analisis data ANBK, laporan penggunaan platform digital	Guru, siswa, data ANBK, laporan rapor pendidikan

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan sesuai dengan metode evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Tahap pertama evaluasi konteks yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang mendasari kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan digitalisasi pendidikan kebijakan digitalisasi pendidikan, aspek yang dievaluasi meliputi kebutuhan digitalisasi di sekolah perkotaan dan pedesaan, relevansi kebijakan dengan visi nasional pendidikan, masalah utama yang dihadapi, seperti kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur. Tahap kedua evaluasi input yang berfokus pada sumber daya, strategi, dan perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam kebijakan digitalisasi, hal ini melibatkan sumber daya yang disediakan, seperti perangkat teknologi, pelatihan guru, dan anggaran, strategi distribusi perangkat ke sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan, perencanaan implementasi kebijakan, termasuk pelibatan pihak-pihak terkait.

Tahap ketiga evaluasi proses yang bertujuan untuk memantau dan menilai pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks digitalisasi pendidikan, proses yang dievaluasi mencakup pelaksanaan distribusi perangkat teknologi, pelaksanaan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, identifikasi hambatan yang muncul selama implementasi, seperti kurangnya infrastruktur atau penerimaan oleh pengguna. Tahap keempat evaluasi hasil yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Dalam evaluasi kebijakan digitalisasi, aspek hasil yang dapat dievaluasi meliputi peningkatan akses teknologi di sekolah perkotaan dan pedesaan, peningkatan kompetensi digital guru dan siswa, dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penelitian ini diukur melalui tercapainya tujuan penelitian yang telah ditentukan. Mampu menghasilkan analisis kebutuhan dan peluang yang mendorong adanya kebijakan digitalisasi di sekolah pedesaan dan perkotaan. Mampu mengumpulkan data sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam penerapan kebijakan digitalisasi. Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan digitalisasi

pendidikan di sekolah pedesaan dan perkotaan. Mampu menghasilkan analisis sejauh mana kebijakan digitalisasi berdampak pada kualitas pembelajaran dan apa saja output yang dihasilkan di sekolah. Menurut Ratnawulan (2015) adapun beberapa tujuan dari evaluasi adalah mengukur efektivitas implementasi digitalisasi pendidikan, menganalisis kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi di wilayah tertentu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, triangulasi data, konfirmasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data penulis menyederhanakan, mengorganisasi, dan memfokuskan data mentah agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah reduksi, data disusun dalam bentuk yang mudah dipahami untuk mempermudah interpretasi. Kemudian Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi metode dan sumber data. Setelah menyusun temuan awal, dilakukan konfirmasi kepada narasumber utama untuk memastikan interpretasi data sesuai dengan realitas yang mereka sampaikan. Data yang telah disajikan dan divalidasi melalui triangulasi serta konfirmasi narasumber dianalisis untuk menarik pola, hubungan, dan makna. Menjawab pertanyaan seperti bagaimana hambatan digitalisasi di sekolah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Menggunakan temuan yang konsisten dari berbagai metode dan narasumber untuk meningkatkan keakuratan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, secara geografis, lokasi dua sekolah yang menjadi objek penelitian ini mencerminkan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan di Pulau Lombok. SDN 10 Buwun Mas terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Wilayah ini berada di bagian barat daya Pulau Lombok, cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah dan memiliki akses jalan yang terbatas. Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan dan pantai, dengan jarak tempuh yang relatif lama menuju kota terdekat. Infrastruktur komunikasi dan jaringan internet di kawasan ini masih belum merata, menyebabkan aktivitas digital di sekolah sangat terbatas. Akses menuju desa ini bergantung pada transportasi darat dengan kondisi jalan yang sebagian besar belum sepenuhnya teraspal. Sementara itu, SDN 23 Ampenan berlokasi di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang merupakan kawasan urban dengan akses yang sangat baik terhadap fasilitas pendidikan, teknologi, dan jaringan transportasi. Sekolah ini berada di pusat kota dan terintegrasi dengan sistem pendidikan digital secara lebih optimal. Ketersediaan internet yang stabil, sarana transportasi umum, serta dukungan infrastruktur pendidikan menjadikan sekolah ini lebih siap dalam mengadopsi kebijakan digitalisasi.

Perbedaan letak geografis ini mempengaruhi secara langsung ketersediaan fasilitas digital dan kesiapan sumber daya manusia. Sekolah di daerah pedesaan seperti SDN 10 Buwun Mas menghadapi hambatan yang kompleks karena terbatasnya infrastruktur dasar, sedangkan sekolah di wilayah perkotaan seperti SDN 23 Ampenan lebih mudah mengakses sumber daya digital, pelatihan, dan pembaruan teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis digital.



Gambar 1. Letak Geografis Sekolah

Hasil komparasi antara SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya jika ditinjau melalui kerangka evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Tabel yang telah disajikan sebelumnya menggambarkan secara sistematis bahwa disparitas ini mencakup aspek kesiapan konteks, ketersediaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta luaran yang dicapai. Evaluasi ini menguatkan pandangan Stufflebeam (1971) bahwa keempat dimensi CIPP saling terhubung dan diperlukan sebagai panduan pengambilan keputusan dalam siklus kebijakan pendidikan.

Context

Evaluasi aspek konteks mengungkapkan adanya ketimpangan yang signifikan antara SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan, khususnya dalam kesiapan lingkungan untuk mendukung kebijakan digitalisasi. Menurut Tuwu (2018) banyak sekolah pedesaan yang menghadapi masalah keterbatasan fasilitas fisik dan sumber daya, ruang kelas yang kurang memadai, kekurangan peralatan pembelajaran seperti komputer dan buku, serta infrastruktur yang tidak memadai. Di SDN 10 Buwun Mas, keterbatasan ekonomi masyarakat dan rendahnya tingkat literasi teknologi menjadi faktor utama yang menghambat integrasi teknologi dalam pembelajaran. Rata-rata orang tua siswa bekerja sebagai petani dan nelayan dengan tingkat penguasaan alat digital yang rendah sehingga anak sangat sulit untuk beradaptasi di lingkungannya. Sebagai daerah pedesaan, sekolah ini juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan digitalisasi karena infrastruktur yang terbatas, baik dalam hal akses internet maupun ketersediaan perangkat teknologi yang memadai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayat dalam Yuniarti (2021), yang menyebutkan bahwa ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam distribusi infrastruktur, serta rendahnya kualitas tenaga pendidik dan sarana penunjang.

Di sisi lain, SDN 23 Ampenan, yang terletak di kawasan perkotaan, memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur teknologi dan dukungan sosial. Lingkungan perkotaan yang lebih terhubung dengan perkembangan teknologi memungkinkan sekolah ini untuk lebih siap dalam mengimplementasikan digitalisasi. Dengan dukungan dari pemerintah kota dan masyarakat yang memiliki tingkat literasi teknologi lebih tinggi, SDN 23 Ampenan dapat dengan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Menurut Rahayu (2021) Siswa di

perkotaan biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap internet berkecepatan tinggi dan perangkat digital, sehingga kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, termasuk penerapan pembelajaran hybrid atau berbasis AI.

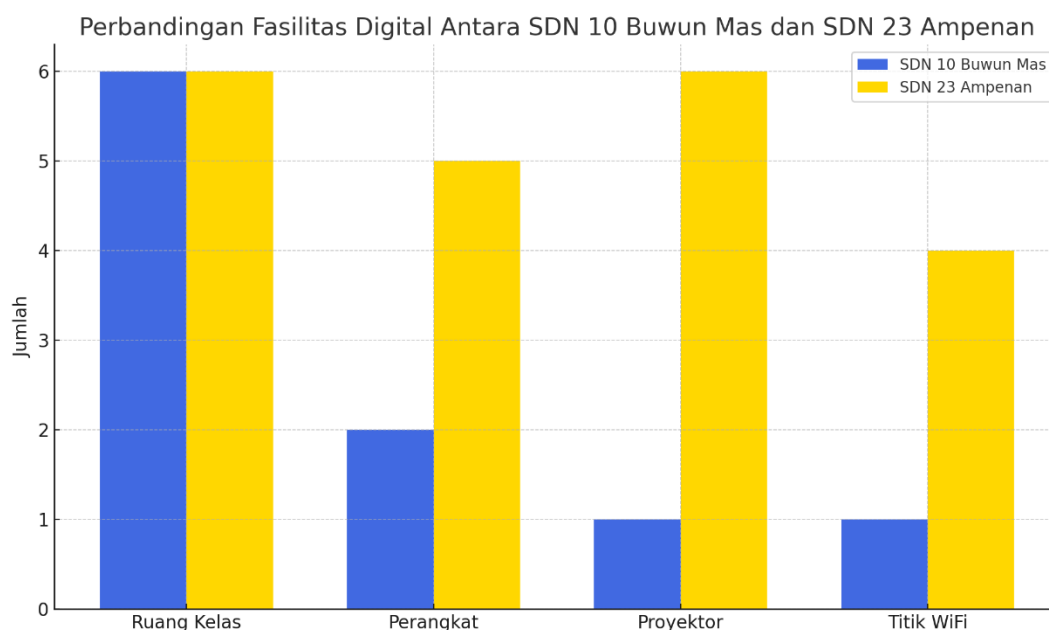
SDN 23 Ampenan memang menunjukkan kesiapan yang lebih baik, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti belum tersedianya perangkat teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan digitalisasi untuk mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah. Pemerintah perlu memperkuat dukungan pada daerah pedesaan dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan meningkatkan literasi teknologi masyarakat serta tenaga pendidik. Pemerintah daerah dan pusat harus melakukan pendataan kebutuhan infrastruktur di daerah pedesaan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut memiliki akses yang memadai terhadap perangkat keras dan internet. Program literasi digital perlu diperluas, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru dan masyarakat di sekitar sekolah agar digitalisasi pendidikan dapat diterima dan dioptimalkan

Tabel 2. Komparatif context sekolah pedesaan dan perkotaan

Komponen	Indikator Evaluasi	SDN 10 Buwun Mas (Pedesaan)	SDN 23 Ampenan (Perkotaan)	Komentar
Context	Kebutuhan Digitalisasi Pendidikan	Sangat tinggi, akses perangkat dan jaringan sangat terbatas	Tinggi, namun sebagian besar kebutuhan dasar sudah terpenuhi	SDN 10 memiliki kebutuhan lebih mendesak untuk digitalisasi
	Kondisi ekonomi dan Dukungan Orang tua	Partisipasi masih rendah, dominan latar belakang ekonomi rendah	Partisipasi aktif dan latar belakang ekonomi yang memadai	Perbedaan partisipasi mempengaruhi percepatan digitalisasi
	Letak Geografis	Berada diatas perbukitan dengan akses jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan	Berada di pusat kota dengan akses yang gampang ke layanan internet, taman belajar dan fasilitas lainnya	Dalam aspek konteks SDN 23 Ampenan lebih diuntungkan dari letak geografisnya

Input

Evaluasi aspek input menggambarkan ketidakseimbangan yang jelas antara SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan, terutama dalam hal ketersediaan perangkat, sumber daya manusia, dan pelatihan. Berikut ditampilkan data grafis perbandingan fasilitas digital antara SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan.



Gambar 2. Perbandingan fasilitas sekolah pedesaan dan perkotaan

Di SDN 10 Buwun Mas, kekurangan perangkat teknologi yang memadai, serta jaringan internet yang tidak stabil, merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan digitalisasi. Ditambah dengan akses jalan ke sekolah yang kurang memadai. Berdasarkan pendapat Sujana (2017) jarak yang jauh dan akses transportasi yang terbatas membuat siswa harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk sampai ke sekolah. Ini berdampak pada ketidakhadiran dan keterlambatan siswa, yang tentunya memengaruhi proses belajar mereka. Guru-guru di sekolah ini juga belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan platform digital seperti PMM, yang merupakan instrumen penting dalam pembelajaran berbasis digital. teori *Resource-Based View* (RBV) dari Barney (1991) menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi ditentukan oleh kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya yang bersifat *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *non-substitutable* (VRIN). Dalam konteks pendidikan, sumber daya ini dapat mencakup infrastruktur teknologi (perangkat digital, konektivitas internet), kompetensi tenaga pendidik, dukungan kebijakan, serta modal sosial dan finansial. Kekurangan sumber daya yang dialami oleh sekolah pedesaan dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan digitalisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyasa (2020), keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya keterampilan digital pada guru, menjadi faktor penghambat utama dalam transformasi pendidikan berbasis teknologi. Sebaliknya,

SDN 23 Ampenan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dalam hal input. Seluruh guru telah mengikuti pelatihan rutin dan telah terbiasa dengan penggunaan platform digital. Selain itu, sekolah ini juga mengembangkan sistem digital internal seperti "Moleh Gati" untuk mendukung administrasi dan pembelajaran. Menurut Widodo (2020), keberhasilan digitalisasi pendidikan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan adanya perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa perangkat yang tersedia dapat digunakan secara maksimal. SDN

23 Ampenan memang memiliki kesiapan input yang lebih baik, namun perlu diingat bahwa kesenjangan ini masih bisa diperlebar jika sekolah-sekolah lainnya di daerah perkotaan juga tidak mendapatkan dukungan yang setara dalam hal pengembangan keterampilan digital. Keterampilan teknologi bagi guru perlu diperbaharui secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Untuk SDN 10 Buwun Mas dan sekolah-sekolah di daerah pedesaan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk penyediaan perangkat teknologi dan akses internet yang lebih baik. Pelatihan bagi guru harus dilaksanakan secara lebih intensif dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan lokal, agar guru dapat lebih cepat beradaptasi dengan platform pembelajaran digital yang ada.

Tabel 3. Komparatif Input sekolah pedesaan dan perkotaan

Komponen	Indikator Evaluasi	SDN 10 Buwun Mas (Pedesaan)	SDN 23 Ampenan (Perkotaan)	Komentar
Input	Sarana dan Prasarana TIK	Terbatas: hanya beberapa perangkat, tidak semua ruang memiliki listrik	Cukup memadai: tersedia proyektor dan akses internet stabil	Perbedaan signifikan dalam kesiapan infrastruktur
	Kompetensi Guru	Sebagian guru belum terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran	Mayoritas guru menguasai platform digital (PMM, Google Classroom dll)	Gap kompetensi mempengaruhi kualitas pembelajaran digital
	Dukungan Pemerintah dan Pelatihan	Sudah menerima bantuan WIFI, namun belum ada bantuan perangkat	Belum ada bantuan Perangkat, Bantuan sering disertai pelatihan, respon cepat dari dinas	Efektivitas bantuan lebih terasa di SDN 23 karena pengelolaan dan SDM

Process

Pada aspek proses, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara kedua sekolah ini menjalankan kebijakan digitalisasi. Di SDN 10 Buwun Mas, pelaksanaan kebijakan digitalisasi belum terorganisir dengan baik. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pendampingan yang intensif, pemanfaatan teknologi di sekolah ini terbatas pada kegiatan administratif dan belum menyentuh proses pembelajaran secara signifikan. Hal ini sesuai dengan temuan Sudijono (2015), yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang tidak terstruktur dengan baik dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Sebaliknya, SDN 23 Ampenan memiliki mekanisme pelaksanaan yang jauh lebih terorganisir, didukung oleh komunitas guru digital yang aktif dan supervisi yang rutin dari kepala sekolah. Dengan adanya pengawasan yang baik, sekolah ini dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi berjalan sesuai dengan

rencana dan dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Proses yang baik tidak hanya mencakup pengawasan tetapi juga adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah, yang menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Namun meskipun pelaksanaan digitalisasi di sekolah ini sudah cukup berhasil namun untuk tindak lanjut seperti adanya pembelajaran berbasis AI/VR masih belum dilaksanakan. Ini memperlihatkan bahwa transformasi teknologi digital di Pendidikan Indonesia masih sangat lambat. Dalam hal ini sekolah pedesaan perlu mengembangkan kemampuan yang jelas terkait dengan implementasi teknologi dalam pembelajaran, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi guru dan staf agar mereka lebih terarah dalam menggunakan teknologi secara maksimal. Penting untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan di tingkat sekolah agar setiap proses pelaksanaan kebijakan dapat terpantau dan diperbaiki secara tepat waktu.

Tabel 4. Komparatif process sekolah pedesaan dan perkotaan

Komponen	Indikator Evaluasi	SDN 10 Buwun Mas (Pedesaan)	SDN 23 Ampenan (Perkotaan)	Komentar
Process	Implementasi Platform Digital (PMM, ARKAS, SIPLah, AN)	Terbatas, guru yang menggunakan PMM dan siswa yang melakukan AN harus dilakukan saat dikota atau tempat yang ada sinyal internet.	Sudah berjalan optimal, bahkan sudah bisa membuat inovasi baru dari kebijakan yang sudah ada	Sekolah perkotaan sudah masuk fase pengembangan, pedesaan masih adaptasi
	Pendampingan dan Supervisi Digitalisasi	Jarang dilakukan, minim supervisi dari pengawas sekolah	Pendampingan rutin dari kepala sekolah, dinas dan pengawas	Peran pengawas dan dinas sangat penting dalam proses digitalisasi
	Kolaborasi antar guru dalam digitalisasi	Masih rendah, terbatas diskusi internal tanpa pendampingan	Aktif, ada komunitas belajar guru dalam penggunaan teknologi	Kolaborasi internal mempercepat adopsi digitalisasi

Product

Evaluasi aspek produk menunjukkan kesenjangan yang besar antara SDN 10 Buwun Mas dan SDN 23 Ampenan dalam hal hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan digitalisasi. Di SDN 10 Buwun Mas, meskipun terdapat upaya untuk mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan, hasilnya belum signifikan. Pembelajaran masih berlangsung secara konvensional, dengan pemanfaatan teknologi yang terbatas pada administrasi dan belum merambah ke dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam. Hal ini sesuai dengan temuan Nasution (2021),

yang menyatakan bahwa tanpa dukungan teknis yang memadai, penggunaan teknologi dalam pembelajaran justru dapat menjadi beban tambahan bagi guru dan siswa.

Di sisi lain, SDN 23 Ampenan telah merasakan dampak positif dari digitalisasi, dengan peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, peningkatan literasi digital, dan efisiensi dalam layanan administrasi. Sekolah ini juga berhasil mengembangkan inovasi sebuah aplikasi bernama “Molah Gati” yang membantu sekolah dalam administrasi secara digital. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa digitalisasi yang terencana dan didukung oleh sumber daya yang memadai dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, SDN 10 Buwun Mas perlu fokus pada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran secara langsung, dengan memanfaatkan berbagai platform yang sesuai untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Peningkatan budaya digital di sekolah-sekolah perlu dilakukan dengan melibatkan siswa, guru, dan masyarakat dalam proses pembelajaran berbasis teknologi, agar teknologi tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga sebagai alat utama dalam pengajaran.

Tabel 5. Komparatif product sekolah pedesaan dan perkotaan

Komponen	Indikator Evaluasi	SDN 10 Buwun Mas (Pedesaan)	SDN 23 Ampenan (Perkotaan)	Komentar
Product	Peningkatan Hasil Belajar Siswa	Belum signifikan, pembelajaran digital belum maksimal digunakan	Ada peningkatan, siswa terbiasa dengan media digital pembelajaran	Efektivitas digitalisasi berkorelasi dengan kesiapan sarana dan SDM
	Partisipasi Siswa dalam ANBK	Terbatas, harus turun ke titik akses sinyal dan terbatas perangkat	ANBK daring penuh, siswa antusias dan cukup siap namun perangkat milik sekolah belum ada	Kesiapan siswa menghadapi evaluasi nasional digital masih timpang
	Perubahan Budaya Sekolah terhadap Teknologi	Mulai terbuka namun lambat, masih dominan cara konvensional	Cukup terbuka dan adaptif terhadap inovasi teknologi	Sekolah perkotaan lebih cepat mengalami perubahan budaya digital

Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar pengembangan teori mengenai hubungan antara digitalisasi pendidikan dan ketimpangan akses pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki strategi digitalisasi pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas.. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam merancang kebijakan yang

lebih inklusif dan merata. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi digital. Dengan demikian, sekolah dan para guru dapat menemukan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung digitalisasi pendidikan di rumah dan komunitas lokal, serta memotivasi mereka untuk mendukung inisiatif digital di sekolah-sekolah. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan digitalisasi pendidikan di pedesaan dan perkotaan dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang beragam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap implementasi kebijakan digitalisasi di SDN 10 Buwun Mas (sekolah pedesaan) dan SDN 23 Ampenan (sekolah perkotaan), maka dapat ditarik kesimpulan Kebutuhan utama di sekolah pedesaan adalah mengatasi keterbatasan kebutuhan dasar siswa, infrastruktur jalan yang minim, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan kebutuhan sekolah perkotaan lebih berfokus pada peningkatan efektivitas pembelajaran dengan teknologi, pengembangan inovasi dan ketersediaan perangkat. Sumber daya yang ada di sekolah pedesaan masih kurang memadai baik dari guru maupun siswa. Sekolah perkotaan memiliki sumber daya mencakup operator TIK sekolah, kepala sekolah sebagai duta digital, jaringan internet yang stabil dan guru serta siswa yang sudah terbiasa dengan teknologi. Pelaksanaan kebijakan digitalisasi pendidikan di sekolah pedesaan sebagian besar harus dilakukan di kota dengan sinyal yang lebih memadai. Pelaksanaan kebijakan di sekolah perkotaan lebih terstruktur karena akses yang lebih baik ke layanan internet, kurikulum berorientasi TIK, guru yang melek teknologi serta pengembangan aplikasi Molah Gati sebagai bentuk inovasi sekolah perkotaan terhadap teknologi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh satu aspek, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari konteks lokal, kesiapan input, efektivitas proses, dan hasil akhir. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, khususnya untuk daerah tertinggal. Pemerintah perlu menata ulang pendekatan kebijakan agar lebih berkeadilan, dengan menekankan penguatan literasi digital, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pendampingan berkelanjutan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar reflektif sekaligus strategis dalam menciptakan transformasi pendidikan digital yang inklusif dan merata di Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product) pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan

kebutuhan digitalisasi yang lebih rinci di setiap wilayah, terutama sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dinas Pendidikan diharapkan memperkuat sosialisasi visi dan tujuan program digitalisasi agar lebih dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan komite sekolah. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek agar memperluas akses dan pemerataan perangkat TIK ke sekolah-sekolah pedesaan melalui program bantuan afirmatif. Salah satu bentuk konkret dari skema ini adalah dengan menetapkan proporsi alokasi anggaran digitalisasi sebesar minimal 70% untuk sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan 30% untuk wilayah perkotaan. Rasionalisasi proporsi ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah di wilayah perkotaan umumnya telah memiliki infrastruktur dasar dan sumber daya manusia yang relatif siap, sehingga kebutuhan pendanaannya lebih berfokus pada pengembangan dan inovasi. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih memerlukan dukungan mendasar berupa pengadaan perangkat digital, pembangunan jaringan internet, pelatihan guru, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. Untuk mempercepat pemerataan digitalisasi pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang tertinggal secara infrastruktur, pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta. Salah satu model yang dapat diadopsi adalah program "Adopt a School", di mana perusahaan teknologi, operator seluler, maupun penyedia perangkat digital dapat mengambil peran aktif dalam mendampingi dan memperkuat transformasi digital di sekolah-sekolah tertentu.

Optimalisasi pemanfaatan PMM (Platform Merdeka Mengajar), ARKAS, dan SIPLah harus diiringi dengan pelatihan berkelanjutan, terutama untuk guru di wilayah yang minim literasi digital. Perlu adanya pendampingan intensif dan berkelanjutan dari dinas pendidikan atau mitra teknis terhadap guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan program digitalisasi, terutama terkait pengoperasian PMM, pelaporan keuangan melalui ARKAS, dan penggunaan SIPLah. Diperlukan integrasi antara pelaksanaan digitalisasi dengan budaya kerja sekolah. Guru harus didorong untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran secara kontekstual, bukan hanya mengikuti pelatihan secara formalitas. Pemerintah perlu membuat indikator keberhasilan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial ekonomi sekolah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi perlu diperkuat dengan pendekatan partisipatif agar masukan dari sekolah benar-benar menjadi dasar perbaikan program di masa depan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara longitudinal guna mengamati dampak kebijakan digitalisasi dalam jangka waktu lima tahun, termasuk perubahan literasi digital guru dan capaian ANBK siswa. Selain itu, perlu dilakukan penelitian serupa di jenjang SMP dan SMA untuk melihat perbedaan tantangan dan kesiapan infrastruktur pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *J. of Management*.
- Dewi, R. S. (2021). Penerapan kebijakan digitalisasi dalam pendidikan sekolah dasar: Studi kasus di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Universitas HKBP Nommensen.
- Kemendikbudristek. (2020). Merdeka belajar: Kebijakan transformasi pendidikan.

- Mulyasa, E. (2020). Pendidikan di Era Digital: Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Daerah Pedesaan. Bandung: Alfabeta.
- Mustari Mohamad, Sudirman dkk (2024). Transformasi Pendidikan di Era Society 5.0 dalam Implementasi Sekolah Penggerak. Scientia: Social Sciences & Humanities. Vol. 3, No. 2, 2024, 189–193
- Nasution, M. (2021). Analisis kualitas pembelajaran daring selama pandemi: Perspektif guru dan siswa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(3), 56–67.
- Rahayu, T., & Arifin, Z. (2021). Kesenjangan digital dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 34–45.
- Ratnawulan, R. (2015). Evaluasi Pembelajaran. Padang: Sukabina Press.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The Relevance of the CIPP Evaluation Model for Educational Accountability
- Sudarmanto, J. (2020). Ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Sudijono, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sujana, K., & Sari, D. (2017). Mobilitas siswa dan akses pendidikan di daerah terpencil. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 54–64.
- Tuwu, M. (2018). Tantangan pendidikan di daerah pedesaan: Perspektif dan solusi. Jakarta: Gramedia.
- UNESCO. (2021). Ensuring inclusive education for rural communities.
- Van Dijk, J. (2006). The Digital Divide. Cambridge: Polity Press.
- Widodo, A. (2020). Efektivitas digitalisasi pendidikan: Studi kasus di sekolah-sekolah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 8(2), 101–113.
- Yuniarti, L. (2021). Kebijakan digitalisasi pendidikan: Meningkatkan kualitas dan akses di daerah tertinggal. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 5(1), 43–56.